



## WRI Indonesia's Call for Concept Note:

### Riset Terkait Penguatan Penegakan Hukum Sektor Kehutanan di Indonesia

#### Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya hutan yang cukup besar, dianggap belum dengan baik mengelola sumberdaya hutan tersebut karena adanya permasalahan dalam penegakan hukum atas kejahatan kehutanan.<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku kejahatan yang masih terus melakukan kegiatan ilegal seperti pembalakan liar, penambangan ilegal dan membakar hutan, terlepas dari adanya peraturan dan sanksi hukum yang diberlakukan. Laporan KPK (2015) memperkirakan jumlah produksi kayu nasional dalam rentang waktu 2003-2014 hanya dilaporkan 19-23% dari jumlah produksi aktual, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 62,8 – 86,9 triliun.<sup>2</sup>

Pemerintah telah berusaha memperketat aturan ataupun kebijakan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan kehutanan, khususnya pembalakan liar. Salah satunya dengan pembentukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada tahun 2009 untuk memastikan legalitas bahan baku kayu melalui skema sertifikasi pada unit usaha dari hulu hingga hilir. SVLK dinilai cukup sukses karena Uni Eropa memberikan hak bagi Indonesia sebagai negara pertama penerbit lisensi FLEGT untuk produk kayu ekspor. Dengan demikian, kayu-kayu Indonesia memperoleh "jalur hijau" untuk masuk pasar Uni Eropa, tanpa melalui mekanisme uji tuntas (*due diligence*) yang diwajibkan pada negara-negara eksportir non-FLEGT.

Selain itu, pada tahun 2013, beberapa institusi penegakan hukum di bidang kehutanan telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding mengenai pendekatan *multi-door* dalam mengatasi kejahatan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan hutan dan gambut. Hal ini mendorong para penegak hukum di Indonesia untuk bersinergi menuntut kejahatan lingkungan dan turunannya, seperti korupsi, pencucian uang, perpajakan dan kejahatan korporasi. Pendekatan *multi-door* dapat dipahami sebagai usaha bersama para penegak hukum dalam sebuah rangkaian kasus menggunakan berbagai macam peraturan perundang-undangan, untuk menjatuhkan sanksi lebih berat atas kejahatan SDA dan lingkungan.

Kajian yang dilakukan oleh UNDP (2015) menunjukkan bahwa pendekatan *multi-door* telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran penegakan hukum dan tingkat penyelesaian kasus, termasuk menargetkan beberapa korporasi dan pengurusnya.<sup>3</sup> Akan tetapi, sanksi pengadilan masih cenderung lemah dan sepertinya tidak memberikan efek jera

---

<sup>1</sup> Kejahatan Kehutanan Kontemporer: Studi Kasus Riau [https://www2.cifor.org/ilea/Database/pdf/4\\_Makalah\\_Jikalahari.pdf](https://www2.cifor.org/ilea/Database/pdf/4_Makalah_Jikalahari.pdf)

<sup>2</sup> Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector: An Analysis of Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Product Administration, <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Executive-Summary-Preventing-State-Loss.pdf>

<sup>3</sup> Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-door Approach to address Natural Resources and Environment-related Crimes in Forest Areas and Peatlands, <https://unredd.net/documents/global-programme-191/governance-452/participatory-governance-assessments-for-redd-651/pga-in-indonesia-1192/15162-executive-summary-of-indonesias-multi-door-approach-assessment-2015/file.html>



terhadap para pelaku. Selain itu, implementasi multi-door cenderung menurun, dengan banyaknya setiap badan penegakan hukum yang melakukan investigasi dan penyidikan secara terpisah.

Selanjutnya, laporan-laporan pemantau independen dan pemberitaan media advokasi, seperti Mongabay, terus memberitakan temuan kejahatan kehutanan dan menunjukkan penegakan hukum yang masih lemah pada sektor ini. Pada Januari 2019, penemuan 384 kontainer kayu merbau di Surabaya dan Makassar, misalnya, menunjukkan bahwa masih ada permasalahan pencucian kayu ilegal di bagian hulu (Papua) rantai pasok yang dilakukan oleh industri bersertifikat SVLK.<sup>4</sup> Selain itu, pada kasus tersebut pengadilan Negeri Makassar yang mengadili pelaku hanya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara pada pimpinan perusahaan yang melakukan pemalsuan dokumen untuk mencuci kayu. Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan harga jual kayu ilegal yang ditemukan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

Mempertimbangkan permasalahan tersebut, Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (WRI Indonesia) mengajak para akademisi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat Sipil untuk berpartisipasi dalam inisiatif **WRI Indonesia's Call for Concept Note: Riset Terkait Penguatan Penegakan Hukum Sektor Kehutanan di Indonesia**. Inisiatif dengan tema besar penguatan penegakan hukum di sektor kehutanan ini bertujuan untuk memfasilitasi institusi, organisasi, ataupun kelompok perorangan dalam melakukan riset atau kajian terkait dalam kurun waktu 6 bulan, melalui dana hibah maksimal sebesar **Rp 200.000.000,-**. Beberapa sub-topik riset yang menjadi prioritas program *call for concept note* adalah:

- Analisis hukum dan/atau kebijakan terhadap inisiatif-inisiatif dan program-program penegakan hukum, baik di tingkat nasional ataupun daerah, yang berfungsi untuk melawan kejahatan kehutanan seperti perambahan kawasan hutan, penyalahgunaan izin konsesi (sawit, IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTI dan sebagainya) di kawasan hutan, penambangan ilegal, penebangan liar, perdagangan kayu ilegal dan kebakaran hutan.
- Perkembangan dan potensi pemanfaatan teknologi dalam monitoring hutan dan penyediaan alat bukti berbasis sains (*scientific-based evidence*) untuk melawan kejahatan kehutanan.
- Perkembangan instrumen hukum pencucian uang dan anti-korupsi untuk menjerat pelaku kejahatan kehutanan.
- Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga hutan dan membantu penegakan hukum (*community-based law enforcement*)

Dengan tujuan diatas, WRI Indonesia mengundang rekan-rekan praktisi, akademisi, ataupun kalangan profesional untuk mengirimkan catatan konsep (*concept note*) tentang ide penelitian atau kajian yang sesuai dengan topik "Riset Terkait Penguatan Penegakan Hukum Sektor Kehutanan di Indonesia". Adapun format *concept note* yang dikumpulkan ke WRI Indonesia harus sesuai dengan format template dalam lampiran berkas ini.

Dari keseluruhan *concept note* yang diterima oleh WRI Indonesia akan dipilih satu ide riset yang akan mendapatkan pembiayaan berupa dana hibah, dan hasil kajian riset yang dihasilkan dari proyek ini akan ditulis sebagai produk riset

---

<sup>4</sup> Sudah 384 Kontainer Kayu Merbau Ilegal Asal Papua Diamankan, Bagaimana Hukuman Pelaku?, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/18/sudah-384-kontainer-kayu-merbau-ilegal-asal-papua-diamankan-bagaimana-hukuman-pelaku/>



dalam bentuk jurnal artikel atau pun produk riset WRI, dimana lembaga penerima hibah dan anggota tim akan menjadi co-author dalam produk riset tersebut.

### Tujuan Kegiatan:

1. Memfasilitasi riset dan kajian terkait penguatan penegakan hukum sektor kejahatan kehutanan di Indonesia.
2. Mencari solusi untuk penguatan penegakan hukum sektor lingkungan melalui riset dan kajian terkait.

### Timeline Kegiatan

Jenis Kegiatan	Agus 2020	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021
1. Pembukaan "Call for Concept Note" dan penerimaan berkas dokumen (2 minggu)										
2. Seleksi berkas dan pengumuman penerima hibah										
3. Proses penandatanganan kontrak hibah dan kerjasama riset antara WRI Indonesia dan penerima hibah										
4. Periode penelitian dan riset										
5. Pengumpulan Laporan Penelitian										
6. Penulisan dan publikasi produk riset										
7. Diseminasi hasil studi (Webinar atau Lokakarya)										

### Targeted audience

Lembaga atau organisasi non-pemerintah, akademisi, peneliti hukum, dan kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja di bidang hukum lingkungan dan/atau sektor kehutanan di Indonesia.

### Kriteria Penilaian Penelitian:

1. Aktual, orisinal dan menjawab permasalahan atau tantangan penegakan hukum di sektor kehutanan.
2. Rancangan penelitian yang logis dan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan anggaran yang diusulkan.
3. Hasil penelitian memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di sektor penegakan hukum, dan/ atau memberikan solusi yang strategis dan tepat guna untuk permasalahan penegakan hukum kejahatan kehutanan.



## Skema hibah proyek

- Proses seleksi meliputi penilaian berkas concept note yang dikirimkan kepada WRI Indonesia. Apabila diperlukan, wawancara dengan kandidat yang lolos seleksi berkas akan dilakukan.
- Yayasan Institut Sumberdaya Dunia (WRI Indonesia) akan melakukan kontrak Kerjasama, baik secara individu maupun antar Lembaga, dalam menyalurkan dana hibah maksimal sebesar Rp 200.000.000,- kepada pendaftar yang terseleksi.
- Lembaga atau individu yang terseleksi harus menyetujui hal-hal yang diatur dalam kontrak Kerjasama dan melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kerjasama.
- Pembayaran hibah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan keluaran (output) dari riset yang dihasilkan, yang diatur dalam kontrak Kerjasama.
- Nilai hibah adalah keseluruhan dana penelitian yang disediakan oleh Yayasan Institut Sumberdaya Dunia dan tidak ada penambahan biaya apapun dalam menunjang penyelesaian proyek riset/penelitian ini. Waktu untuk melakukan riset/penelitian ini adalah maksimal enam bulan (September 2020 – Februari 2021), dan tidak ada perpanjangan waktu pengerjaan proyek, kecuali telah mendapatkan izin dari pihak Yayasan Institut Sumber daya Dunia.
- Peserta yang terseleksi wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan tim WRI Indonesia dalam melakukan kajian atau riset yang disetujui untuk didanai melalui program hibah ini.
- Hasil penelitian akan didiseminasikan secara online (Webinar) atau offline (Lokakarya) dan harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau produk riset WRI.

## Deadline Pengumpulan Concept Note

Berkas template *Concept Note* dapat dikirimkan kepada Yayasan Institut Sumberdaya Dunia melalui email: Kenny Cetera ([kenny.cetera@wri.org](mailto:kenny.cetera@wri.org)); Mirzha Hanifah ([mirzha.hanifah@wri.org](mailto:mirzha.hanifah@wri.org)) dengan menuliskan "**Pendaftaran Call for Concept Note- Riset Penegakan Hukum**" pada bagian subyek email

Pengiriman berkas *concept note* dibuka sampai dengan tanggal 4 September 2020. Yayasan Institut Sumberdaya Dunia hanya akan memproses berkas yang ditulis dengan menggunakan template *Concept Note* pada bagian lampiran dokumen ini.